



## **BUPATI KATINGAN**

---

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008-2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Katingan Tahun 2008-2013 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008-2013**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas atonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Indikator kerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
7. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan.

## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2009-2013 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan adalah :
  1. Persentase anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SD, SLTP dan SLTA
  2. Rasio ketersediaan ruang kelas dan fasilitas belajar disetlap kecamatan
  3. Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal, wirausaha, agribisnis dan teknologi informasi
  4. Rasio guru dan murid perbidang studi dan perkelas
  5. Persentase guru yang memenuhi standar kompetensi
  6. Peringkat kelulusan SD, SMP SMA : IPA, PS Bahasa

- dan SMK
- 7 Persentase sekolah yang memenuhi standar nasional dan internasional
  - 8 Persentase anak usia putus sekolah yang menyelesaikan paket A,B dan C
  - 9 Persentase pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar mutu
  - 10 Rasio sekolah kejuruan dan sekolah umum
  - 11 Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Katingan  
SD/MI/Paket A  
SMP/MTs/Paket B  
SMA/SMK/MA/Paket C  
Angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten Katingan  
SD/MI/Paket A  
SMP/MTs/Paket B  
SMA/SMK/MA/Paket C
  - 12 Cukup ASI eksklusif
  - 13 Persentase balita kurang gizi
  - 14 Persentase sekolah yang melaksanakan pemantauan gizi
  - 15 Persentase ibu hamil cukup gizi
  - 16 Persentase KK yang menerapkan pola pangan harapan
  - 17 Jumlah desa wisata aktif di desa
  - 18 Persentase keluarga ikut KB total fertility rate (tingkat pertumbuhan penduduk)
  - 19 Persentase Kecamatan yang memiliki PIK-KRR
  - 20 Jumlah dan ragam buku di perpustakaan yang sesuai potensi daerah
  - 21 Jumlah pengunjung perpustakaan
  - 22 Persentase desa yang memiliki perpustakaan
  - 23 Jumlah buta aksara
  - 24 Jumlah konsumsi ikan perkapita per tahun
  - 25 Jumlah keluarga gizi kurang dua setiap desa
  - 26 Persentase desa yang menjadi desa siaga
  - 27 Persentase desa yang bebas penyakit menular
  - 28 Persentase desa uci
  - 29 Persentase desa yang memiliki posyandu dan PKK aktif
  - 30 Persentase desa yang bebas penyakit zoonis
  - 31 Rasio kecukupan tenaga perawat dengan tempat tidur
  - 32 Jumlah akreditasi yang diperoleh
  - 33 Jumlah dan jenis dokter spesialis dan sub spesialis
  - 34 Persentase pasien miskin terawat di kelas III
  - 35 Persentase rujukan RS lain
  - 36 Persentase pasien sembuh pulang
  - 37 Persentase pelayanan yang sesuai standar mutu
  - 38 Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar mutu

- 39 Persentase kematian pasien yang dirawat > 24 jam
- 40 Persentase pukesmas diwilayahnya yang mampu menangani secara dini kasus gawat darurat
- 41 Persentase pasien yang terlayani di puskesmas
- 42 Persentase bayi, anak, bumil, kelompok resiko tinggi yang terlindungi dari penyakit
- 43 Persentase puskesmas/pustu/ poskesdes/polindes yang memenuhi standart mutu
  
- 44 Persentase KLB dan kejadian penyakit potensial wabah yang tertangani kurang 24 jam
- 45 Prevalensi penyakit malaria
- 46 Proyeksi kelahiran dalam 3 bulan mendatang yang mendapat perlindungan persalinan nakes (persalinan nakes)
- 47 Persentase kecamatan yang memiliki sentra pelatihan produksi dan wirausaha yang aktif
- 48 Persentase pengangguran yang menjadi tenaga kerja produktif atau wirausaha
- 49 Jumlah potensi daerah yang dikembangkan
- 50 Jumlah wirausaha baru di bidang pertanian
- 51 Jumlah usaha baru bidang kehutanan
- 52 Jumlah usaha baru bidang perikanan
- 53 Jumlah wirausaha baru bidang perindagkop
- 54 Jumlah usaha baru di bidang pariwisata
- 55 Jumlah pengangguran di setiap desa
- 56 Jumlah prestasi Regional, Nasional dan Internasional dibidang Iptek
- 57 Jumlah karya inovatif yang dihasilkan
- 58 Jumlah prestasi regional, nasional dan Internasional dibidang olah raga
- 59 Jumlah pemuda, organisasi kepemudaan dan olah raga yang meraih prestasi
- 60 Jumlah event olah raga dan seni budaya berskala nasional, regional dan internasional di Katingan
- 61 Jumlah pemuda pelopor pembangunan desa
- 62 Jumlah prestasi regional, nasional dan internasional dibidang budaya
- 63 Jumlah sanggar seni budaya/penggiat seni
- 64 Jumlah prestasi regional, nasional dan internasional di bidang imtaq
- 65 Jumlah event keagamaan berskala regional, nasional dan internasional di katingan
- 66 Persentase sentra produksi dan kawasan pemukiman yang memiliki akses jalan dan jembatan, drainase dan sanitasi yang memadai
- 67 Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinu
- 68 Persentase desa yang memiliki air bersih
- 69 Persentase kecamatan yang bebas sampah

- berserakan
- 70 Persentase sentra produksi dan kawasan pemukiman yang memiliki akses transportasi yang lancar
  - 71 Rasio ketersediaan jaringan trayek perkotaan/pedesaan
  - 72 Persentase ketersediaan fasilitas Lalin
  - 73 Persentase sawah yang terairi secara kuntuin
  - 74 Persentase sawah yang memiliki jalan usaha tani
  - 75 Persentase serta produksi pertanian yang memiliki unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) gudang dan lantai jemur, rice mill dll
  - 76 Jumlah RPH yang memiliki sarana prasarana pengolahan limbah, drainase dan sanitasi
  - 77 Jumlah stasiun pendaratan ikan perairan umum
  - 78 Jumlah pangkalan pendaratan ikan
  - 79 Jumlah stasiun pembenihan ikan lokal
  - 80 Jumlah balai benih ikan
  - 81 Jumlah mini raiser untuk ikan hias
  - 82 Persentase pasar yang memiliki sanitasi dan fasum yang bersih
  
  - 83 Persentase kawasan industri dan perdagangan yang memiliki sarana dan fasilitas penaganan limbah
  - 84 Jumlah kawasan perdagangan representatif yang mampu menampung perdagangan komoditas serta kebutuhan masyarakat Katingan dan sekitarnya
  - 85 Persentase sentra produksi dan kawasan pemukiman yang memiliki listrik yang memadai
  - 86 Jumlah KK Pelanggan Air Bersih
  - 87 Rasio air terdistribusi dan air konsumsi
  - 88 Persentase sentra produksi dan kawasan pemukiman yang memenuhi standar kesehatan
  - 89 Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi standar pemukiman
  - 90 Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehabilitasi
  - 91 Persentase objek wisata yang memiliki fasilitas yang memadai
  - 92 Jumlah fasilitas dan sarana olah raga dan kepemudaan yang memadai
  - 93 Jumlah desa mandiri energi
  - 94 Persentase desa yang terpelihara sarana dan prasarananya
  - 95 Jumlah stimulan dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya
  - 96 Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima
  - 97 Persentase desa yang bebas sampah berserakan dan pencemaran lingkungan
  - 98 Persentase Pembangunan sesuai RTRWP

- 99 Persentase Kecamatan yang memiliki rencana detail tata ruang (RDTR)
- 100 Persentase bangunan yang sesuai RTBL
- 101 Rasio ruang terbuka hijau
- 102 Persentase Kecamatan bebas sampah berserakan
- 103 Persentase Pertanian sesuai tata ruang
- 104 Persentase penurunan konversi lahan pertanian
- 105 Persentase pembangunan kawasan industri dan perdagangan yang sesuai tata ruang
- 106 Persentase pembangunan kawasan budidaya yang sesuai tata ruang
- 107 Persentase pemanfaatan kawasan hutan sesuai tata ruang
- 108 Pembangunan transportasi sesuai tataran transportasi lokal (TATRALOK)
- 109 Persentase rumah tinggal yang sesuai RTBL.
- 110 Jumlah dan ragam tanaman buah di kebun raya
- 111 Jumlah dan ragam tanaman hutan tropis di kebun raya
- 112 Ragam dan jumlah fasilitas wisata dan budaya di kawasan kebun raya
- 113 Jumlah pelaku usaha pariwisata sekitar kebun raya
- 114 Ragam dan jumlah trayek yang nyaman menuju kebun raya
- 115 Persentase kawasan kebun raya bebas penyakit menular
- 116 Jumlah fasilitas jalan, fasum dan fasos dalam kawasan kebun raya
- 117 Jumlah Desa rawan pangan
- 118 Jumlah lumbung pangan di kelola dengan baik
- 119 Persentase ketersediaan protein hewani dan nabati
- 120 Persentase ketersediaan pangan sehat bagi masyarakat
- 121 Persentase pemenuhan pangan lokal
- 122 Persentase pemenuhan kebutuhan pangan bersumber ikan
- 123 Jumlah RTM yang memperoleh Raskin
- 124 Persentase desa pertanian yang memiliki pendamping desa dan kelompok usaha yang aktif memajukan desanya
- 125 Persentase kelompok usaha pertanian yang produktif
- 126 Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha tani (intensif bagi pendamping)
- 127 Persentase desa perikanan yang memiliki pendamping desa dan kelompok usaha yang aktif memajukan desanya
- 128 Persentase kelompok usaha budidaya ikan dan nelayan yang produktif

- 129 Persentase peningkatan produktifitas kelompok usaha budidaya ikan dan nelayan
- 130 Persentase desa sekitar hutan yang memiliki pendamping dan kelompok usaha yang aktif memajukan desanya
- 131 Persentase kelompok usaha bina desa hutan yang produktif
- 132 Persentase peningkatan produktifitas kelompok usaha bina usaha hutan
- 133 Persentase desa yang memiliki koperasi dan UMKM berprestasi
- 134 Jumlah dan ragam koperasi dan UMKM berprestasi
- 135 Persentase peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM
- 136 Jumlah dan ragam koperasi & UMKM berprestasi
- 137 Jumlah dan ragam IRT
- 138 Peningkatan Produktivitas IRT
- 139 Persentase Desa Yang memiliki pasar Desa
- 140 Persentase desa yang memiliki kelompok belajar usaha (KBU) dan kelompok wirausaha desa (KWD) yang produktif
- 141 Persentase peningkatan produktifitas KBU dan KWD
- 142 Persentase desa yang memiliki kelompok usaha bersama (KUBE) yang aktif memajukan desanya
- 143 Persentase KUBE yang produktif
- 144 Persentase peningkatan produktifitas KUBE
- 145 Persentase desa yang memiliki pendamping dan kelompok usaha ekonomi pedesaan (UEP) yang aktif memajukan desanya
- 146 Persentase UEP yang produktif
- 147 Persentase peningkatan produktifitas UEP (intensif bagi pendamping)
- 148 Persentase desa yang memiliki UPPKS aktif
- 149 Jumlah kelompok usaha aktif disetiap desa dengan anggota yang berbeda
- 150 Persentase kecamatan yang memiliki LKM yang mampu menjamin pengembangan usaha komoditas unggulannya
- 151 Persentase kecamatan yang memiliki klinik bisnis yang mengembangkan usaha di daerahnya
- 152 Jumlah dana bergulir disetiap desa
- 153 Jumlah dana kemitraan dari perusahaan / lembaga donor
- 154 Jumlah desa dengan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang mampu menjamin gapoktan
- 155 Jumlah dana bergulir untuk gapoktan
- 156 Persentase kecamatan yang memiliki UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) kelautan dan perikanan

- 157 Jumlah dana bergulir untuk kelompok usaha perikanan
- 158 Persentase desa yang memiliki USPP (Usaha Simpan Pinjam Perempuan) produktif
- 159 Jumlah dana bergulir melalui USPP
- 160 Persentase penurunan KK miskin di desa
- 161 Persentase/Jumlah dana bergulir yang kembali di setiap desa
- 162 Persentase kecamatan yang memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau serta fasilitas pemasaran komoditas unggulannya
- 163 Persentase kecamatan yang terjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan input produksi
- 164 Volume Produksi pertanian yang di jual melalui pasar
- 165 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana produksi pertanian
- 166 Persentase pemenuhan kebutuhan sarprodan
- 167 Lancarnya angkutan barang dan jasa dari/ke pasar dan pelabuhan
- 168 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara akurat dan up-to-date
- 169 Persentase potensi SDA dengan data yang disajikan secara on-line, rinci, akurat dan up-to-date
- 170 Persentase potensi SDA yang di promosikan
- 171 Persentase pertumbuhan realisasi Investasi PMA PMDN
- 172 Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan SDA
- 173 Jumlah potensi bidang pertambangan dan energy yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 174 Persentase potensi yang dikembangkan
- 175 Jumlah potensi keanekaragaman hayati yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 176 Persentase potensi yang dikembangkan
- 177 Jumlah potensi kehutanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 178 Persentase potensi yang dikembangkan
- 179 Jumlah potensi pertanian yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 180 Persentase potensi yang dikembangkan
- 181 Jumlah potensi bidang perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 182 Persentase potensi yang dikembangkan
- 183 Jumlah potensi bidang perdagangan dan perindustrian yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date

- 184 Persentase pertumbuhan industri yang mengelola SDA
- 185 Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date
- 186 Persentase potensi yang dikembangkan
- 187 Jumlah potensi SDA dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar yang dapat diakses secara online dan up-to-date
- 188 Ragam dan komoditas unggulan pertanian yang menerapkan benih/bibit teknologi yang unggul
- 189 Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian
- 190 Jumlah benih unggul yang dihasilkan
- 191 Ragam dan jumlah komoditas yang terjamin kontinuitas produksinya
- 192 Ragam dan jumlah teknologi yang unggul
- 193 Ragam komoditas unggulan kelautan dan perikanan yang menerapkan benih/bibit, teknologi produksi yang unggul
- 194 Peningkatan produksi komoditas unggulan kelautan dan perikanan
- 195 Jumlah benih unggulan yang dihasilkan
- 196 Ragam dan jumlah komoditas yang terjamin kontinuitas produksinya
- 197 Ragam dan jumlah teknologi yang unggul
- 198 Ragam dan komoditas unggulan kehutanan yang menerapkan benih/bibit, teknologi yang unggul
- 199 Peningkatan produksi komoditas unggulan kehutanan
- 200 Jumlah benih unggul yang dihasilkan
- 201 Ragam dan jumlah komoditas yang terjamin kontinuitas produksinya
- 202 Ragam dan jumlah teknologi produksi yang unggul
- 203 Persentase kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk rotan
- 204 Ragam dan komoditas unggulan pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi produksi yang unggul
- 205 Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertambangan dan energi
- 206 Ragam dan jumlah teknologi yang unggul
- 207 Ragam dan komoditas unggulan dengan kemasan yang unggul
- 208 Peningkatan produksi komoditas unggulan perindustrian dan perdagangan
- 209 Ragam dan jumlah komoditas yang terjamin kontinuitas produksinya
- 210 Ragam dan jumlah teknologi produksi yang unggul

- 211 Volume ekspor komoditas
- 212 Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes dan wartekdes
- 213 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan
- 214 Persentase lahan kritis yang direklamasi
- 215 Persentase lahan tidur yang dimanfaatkan untuk pertanian
- 216 Persentase kecamatan yang memiliki peta lahan kritis
- 217 Persentase luas kawasan hutan kritis direboisasi
- 218 Persentase lahan kritis dan lahan tidur yang dimanfaatkan untuk perindustrian dan perdagangan
- 219 Persentase danau dan rawa tidak produktif yang direhabilitasi
- 220 Persentase kawasan pesisir kritis yang direhabilitasi
- 221 Persentase usaha kehutanan yang menerapkan pola kemitraan
- 222 Persentase kecelakaan dalam kegiatan pertambangan
- 223 Persentase usaha kehutanan yang menerapkan pola kemitraan
- 224 Persentase usaha kelautan dan perikanan yang menerapkan pola kemitraan
- 225 Persentase usaha pertanian yang menerapkan pola kemitraan
- 226 Persentase usaha perindustrian yang menerapkan pola kemitraan
- 227 Persentase penyerapan tenaga kerja lokal
- 228 Jumlah dan nilai kompensasi CSR/CD
- 229 Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan
- 230 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi pentakit menular
- 231 Jumlah kemitraan yang dilakukan BUMD dalam pengelolaan SDA
- 232 Rasio-rasio keuangan BUMD
- 233 Persentase limbah yang didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi
- 234 Jumlah pendapatan dari pengolahan limbah
- 235 Jumlah UMKM yang mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi
- 236 Persentase limbah pertanian yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi
- 237 Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan limbah
- 238 Persentase limbah kehutanan yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi
- 239 Persentase limbah perikanan yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi
- 240 Jumlah konflik antar kehidupan beragama,

- demokrasi dan politik masyarakat
- 241 Jumlah penanganan pelanggaran Perda
  - 242 Jumlah kegiatan unjuk rasa yang aman dan damai
  - 243 Persentase daerah ran bencana yang memiliki system mitigasi bencana yang efektif
  - 244 Jumlah produk hukum daerah yang disahkan secara tepat waktu
  - 245 Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara tepat waktu
  - 246 Akuratnya Informasi pemerintah yang beredar dimasyarakat
  - 247 Terbangunnya citra positif pemerintah di mata masyarakat (indeks kepuasan masyarakat)
  - 248 Persentase kecamatan yang memiliki batas wilayah yang jelas
  - 249 Persentase lahan pemerintah yang bersertifikat
  
  - 250 Jumlah tempat peribadatan yang mendapat bantuan
  - 251 Jumlah bantuan untuk kemasyarakatan, pemuda, olahraga dan seni budaya
  - 252 Persentase pengguna tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan
  - 253 Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan
  - 254 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
  - 255 Persentase penyelesaian kasus KDRT, trafficking dan perlindungan anak
  - 256 Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas
  - 257 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi
  - 258 Persentase penurunan penambangan tanpa ijin
  - 259 Persentase penurunan illegal logging
  - 260 Persentase obat dan makanan beredar dimasyarakat memenuhi syarat kesehatan
  - 261 Persentase sarana kesehatan swasta yang memiliki ijin
  
  - 262 Persentase barang dan jasa sesuai ketentuan
  - 263 Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang layak konsumsi
  - 264 Persentase peternakan yang mematuhi ketentuan peternakan
  - 265 Persentase nelayan menggunakan alat tangkap dan bahan mematuhi ketentuan
  - 266 Persentase ikan dan hasil olahan yang layak konsumsi
  - 267 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparaturnya tepat waktu
  - 268 Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha
  - 269 Persentase ketaatan usaha dibidang pariwisata

- 270 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan sertifikat lahan di setiap desa
- 271 Persentase desa/kelurahan yang memiliki batas wilayah yang jelas
- 272 Kondusifnya wilayah kecamatan
- 273 Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu
- 274 Persentase aparatur yang mencapai sasaran kinerja
- 275 Persentase aparatur yang memperoleh reward dan punishment yang jelas
- 276 Persentase unit kerja yang memiliki alokasi SDM sesuai kebutuhan
- 277 Persentase jabatan structural dan fungsional yang memiliki standar kompetensi
- 278 Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai
- 279 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
- 280 Persentase SKPD menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat
- 281 Persentase SKPD menerapkan system perencanaan dan movev terintegrasi secara on-line
- 282 Persentase penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat kabupaten, provinsi dan regional
- 283 Persentase kasus pengaduan masyarakat yang dituntaskan
- 284 Persentase SKPD yang menerapkan penggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu secara terintegrasi dengan hasil yang terukur
- 285 Persentase kecamatan yang menerapkan SIAK secara on-line
- 286 Persentase kecamatan yang memiliki data keluarga yang up-to-date dan akurat
- 287 Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat
- 288 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara On-line (\*\*\*\*)
- 289 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu
- 290 Persentase desa yang memiliki profi desa
- 291 Persentase perangkat desa/kelurahan yang menerapkan buku administrasi pemerintahan desa
- 292 Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
- 293 Persentase desa yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan Alokasi Dana Desa (ADD) secara tepat waktu

- 294 Persentase kelengkapan dokumen arsip daerah
- 295 Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
- 296 Persentase desa yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
- 297 Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara online di kecamatan
- 298 Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat
- 299 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
- 300 Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar
- 301 Persentase SKPD yang menerapkan system keuangan dan asset daerah uang on-line dan terintegrasi
- 302 Persentase asset daerah yang diinventarisir dan digunakan secara tepat
- 303 Teridentifikasi factor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran grand strategi secara periodik
- 304 Persentase pemenuhan terhadap SOP
- 305 Persentase pencapaian target kinerja
- 306 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara On-line (\*\*\*\*)
- 307 Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pembinaan pemerintahan
- 308 Persentase penyandang masalah sosial yang ada fasilitas umum
- 309 Rasio jumlah panti sosial dengan penyandang masalah sosial

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan ;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Oktober 2011



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Oktober 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 33